

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan interpretasi data mengenai implementasi *E-Government* melalui *Website* Desa Ngumpakdalem Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori *E-Government* menurut (Indrajit, 2006), dapat diketahui bahwa *Website* Desa Ngumpakdalem telah dimanfaatkan sebagai media pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penyediaan informasi, komunikasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, implementasi *E-Government* tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan *Website*, pemanfaatan fitur interaksi, serta penyediaan pelayanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan indikator *Publish*, *Interact*, dan *Transact* sebagai berikut.

1. *Publish*

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan indikator ***Publish*** pada *Website* Desa Ngumpakdalem telah menunjukkan adanya pemanfaatan *Website* sebagai media penyedia informasi publik kepada masyarakat. *Website* telah memuat berbagai informasi mengenai profil desa, berita, layanan, serta dokumen pemerintahan sehingga mampu mendukung keterbukaan informasi publik. Namun, implementasinya masih belum optimal karena masih ditemukan beberapa submenu yang belum terisi, informasi yang belum diperbarui secara berkala, serta belum tersedianya beberapa informasi penting sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, dimana pengelolaan *Website* masih dirangkap oleh Sekretaris Desa sebagai operator *Website* sehingga proses pembaruan informasi belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, belum adanya

monitoring dan evaluasi secara berkala dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga menyebabkan pembaruan konten *Website* kurang berjalan secara konsisten. Akibatnya, *Website* belum sepenuhnya mampu mendukung keterbukaan informasi publik yang aktual dan berkelanjutan, meskipun secara umum telah memenuhi fungsi dasar **Publish** sebagai media publikasi informasi pemerintahan desa.

2. *Interact*

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan indikator **Interact** menunjukkan bahwa *Website* Desa Ngumpakdalem telah menyediakan sarana komunikasi melalui fitur komentar dan media sosial pemerintah desa sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Meskipun demikian, pemanfaatan komunikasi dua arah melalui *Website* masih belum berjalan secara optimal karena sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan WhatsApp atau datang langsung ke kantor desa untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, maupun mengurus berbagai keperluan. Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dalam menggunakan media komunikasi yang lebih praktis, tetapi juga karena *Website* belum mampu memberikan respons yang cepat serta belum didukung oleh fitur interaksi yang aktif dan responsif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola *Website* menyebabkan komunikasi melalui *Website* belum dapat dilakukan secara berkelanjutan. Akibatnya, *Website* belum menjadi media utama dalam membangun komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga pelaksanaan indikator **Interact** masih tergolong rendah karena fungsi komunikasi dua arah lebih banyak berlangsung melalui media komunikasi di luar *Website*.

3. *Transact*

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan indikator **Transact** pada *Website* Desa Ngumpakdalem masih belum berjalan secara optimal karena *Website* belum menyediakan pelayanan administrasi yang dapat dilakukan secara daring. *Website* desa saat ini lebih banyak

dimanfaatkan sebagai media penyedia informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan, sedangkan seluruh proses pelayanan administrasi masih dilakukan secara langsung di kantor desa. Meskipun informasi pelayanan yang tersedia pada *Website* telah membantu masyarakat dalam mempersiapkan dokumen dan memahami alur pelayanan sehingga dapat menghemat waktu, fungsi transaksi elektronik yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan, mengunggah berkas, memperoleh dokumen, maupun mengakses pelayanan secara digital belum tersedia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta belum diprioritaskannya pengembangan pelayanan publik berbasis digital oleh pemerintah desa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya mendukung pengembangan pelayanan digital karena dinilai dapat memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan pelayanan. Namun demikian, hingga saat penelitian dilakukan, *Website* Desa Ngumpakdalem masih berada pada tahap penyediaan informasi pelayanan dan belum mencapai tahap pelayanan publik berbasis transaksi elektronik sebagaimana konsep *Transact* dalam teori *E-Government* menurut (Indrajit, 2006).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *E-Government* melalui *Website* Desa Ngumpakdalem Kabupaten Bojonegoro, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pengelolaan *Website* desa serta pelaksanaan *E-Government*. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut.

1. Saran bagi Pemerintah Desa Ngumpakdalem

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *E-Government* melalui *Website* Desa Ngumpakdalem telah berjalan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar *Website* tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga mampu mendukung

komunikasi dan pelayanan publik secara optimal. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Meningkatkan pengelolaan dan pembaruan informasi *Website* dengan melakukan pembaruan informasi secara berkala pada seluruh menu dan submenu *Website*, sehingga informasi yang disajikan tetap aktual, lengkap, dan sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Website* melalui penambahan atau penunjukan pengelola *Website* yang lebih fokus, sehingga tugas pembaruan informasi tidak hanya bergantung pada Sekretaris Desa sebagai operator *Website*.

c. Mengoptimalkan fungsi komunikasi melalui *Website* dengan mengaktifkan fitur komunikasi dua arah, meningkatkan kecepatan respons terhadap pertanyaan maupun aspirasi masyarakat, serta mengintegrasikan *Website* dengan media komunikasi yang lebih sering digunakan masyarakat agar interaksi dapat berlangsung secara lebih efektif.

d. Mengembangkan pelayanan publik berbasis digital secara bertahap, seperti penyediaan layanan administrasi daring, pengajuan permohonan surat secara elektronik, unggah dokumen persyaratan, serta pelacakan proses pelayanan sehingga *Website* tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai media pelayanan publik.

e. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan *Website* Desa Ngumpakdalem agar masyarakat lebih memahami fungsi *Website* dan terdorong untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia.

2. Saran bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Sebagai instansi yang memiliki peran dalam pembinaan dan pengembangan *Website* desa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada pemerintah desa melalui peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, pelatihan pengelolaan *Website*, serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pembaruan informasi maupun kualitas pengelolaan *Website* desa. Selain itu, dukungan dalam pengembangan infrastruktur dan sistem pelayanan publik berbasis digital juga diperlukan agar implementasi *E-Government* di tingkat desa dapat berjalan secara lebih optimal.

3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada implementasi *E-Government* melalui *Website* Desa Ngumpakdalem berdasarkan indikator *Publish*, *Interact*, dan *Transact* menurut Indrajit (2006). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang lebih luas, melibatkan lebih banyak informan, atau menggunakan teori maupun indikator lain sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *E-Government* di tingkat pemerintahan desa. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pengembangan pelayanan publik berbasis digital maupun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi *Website* desa sebagai sarana pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic government: Konsep pelayanan publik berbasis internet dan teknologi informasi*. Aptikom.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Siyoto, & Sodik. (2015). *Dasar metodologi penelitian*.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana. (2012). *Metodologi penelitian: Model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yuhefizar. (2009). *Cara mudah membangun website interaktif menggunakan CMS Joomla*. Elex Media Komputindo.
- United Nations Development Programme. (2012). *E-Government for development: A practical guide for developing countries*.
- United Nations. (2024). *E-Government Survey 2024*.
- Organisation for Digital Government Studies. (n.d.). *The e-Leaders handbook on the governance of digital government*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2025). *Kabupaten Bojonegoro dalam angka 2025 (Bojonegoro Regency in Figures 2025)*.

Artikel Jurnal

- Akbar, M., Jaya, F., & Putubasai, E. (2019). Implementasi website desa dalam pemberian pelayanan informasi pembangunan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 1, 42–51. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v1i1.888>
- Ayomi, P. K., Sarkol, A. L., Hurulean, P. H., & Mega, Y. (2025). E-Government pelayanan administrasi desa berbasis elektronik di Desa Ngefuit Kabupaten Maluku Tenggara. 2018, 136–143.

Cahyono, A. S., Sarahfina, M., & Destaru, B. (2024). Pengelolaan dan pemanfaatan website sistem pelayanan administrasi (SILASTRI) pada Pemerintah Desa Mirigambar. 7(8), 3088–3094. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5994>

Dayurni, P., Azzahro, S. F., Nurosid, R., & Hamron, M. (n.d.). Perancangan dan implementasi website desa untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai media informasi Desa Jatimulya.

Djabbari, M. H., Irfan, B., Nugroho, T. C., & Yanto, E. (2024). Implementasi e-government dalam pelayanan publik berbasis website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka.

F. Akbar, M. (2019). *Website desa dalam pemberian pelayanan informasi pembangunan*.

Helmi et al. (2024). Digitalisasi nagari: Pengelolaan website pemerintahan Nagari Salimpaung. 13(1), 13–22.

Kadja, A., & Zega, Y. K. (2026). Tinjauan literatur sistem informasi pelayanan publik berbasis website. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.62282/juilmu.v3i1.1-14>

Musthofa, A., Lukito, C., & Suhindarno, H. (2024). Optimalisasi penggunaan website sistem informasi desa di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. 8(1), 211–221.

Wahdania, & Suhab. (2025). Pengelolaan website Desa Nepo sebagai media informasi. *MACOA: Jurnal PKM*, 2(1), 25–31.

Yulianti, I., Suprastiyo, A., Swasanti, I., & Bojonegoro, U. (2025). E-Government melalui aplikasi Ibuk-E dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Prayungan. 18(1), 121–134.

Peraturan Perundang-undangan

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).